

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Crince le Roy, *Kekuasaan ke-empat Pengenalan Ulang*, diterjemahkan Soehardjo, (Semarang: 1981).

Denny Indrayana, *Negara Antara Ada dan Tiada Reformasi Hukum Ketatanegaraan*. (Jakarta: Penerbit Kompas Media Nusantara, 2008).

HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: Penerbit Rajagrafindo, 2014).

Ismail Nurdin, Sri Hartati. 2019. "Metodologi Penelitian Sosial". (Surabaya: Media Sahabat Cendekia).

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2010).

Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Penerbit PT. Bhuna Ilmu , 2007).

Lukman Hakim, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia*, (Malang: Penerbit Setara Press, 2010).

Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya, 2004).

Ni' Matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*. (Yogyakarta: Penerbit: UII Press, 2007).

Satjipto Rahardjo , *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing, 2009)

Sarah Nuraini Siregar, dkk, *Reformasi Struktural Polri Tahun 1999-2010*. (Yogyakarta: Penerbit CV Andi Offset 2015).

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2001).

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik* (Depok: Penerbit Rajawali Press, 2018)

Zaenal Abidin, *Analisis Eksistensial*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

### **Jurnal/Artikel Ilmiah**

Dahlil Marjon, “Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional Terhadap Peningkatan Profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)”, *International Journal of Social and Local Economic Governance (IJLEG)*, Vol. 1, No. 1, A, (April, 2015).

Husni Thamrin, “Menyoal Kedudukan Polri Dalam Sistem KetatanegaraanIndonesia Sebagai Negara Demokrasi”, *Jurnal Legalitas*, Vol. 01., No 1., (2023).

Muhammad Fadli Rijal, “Memahami desain metode penelitian kualitatif”, *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21. No.1, (2021).

M. Zakariah Askari, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development (R n D)*. (Kolaka: Penerbit Yayasan Pondok Pesantren Alkawaddah Warrahmah, (2020).

Nasrullah, “Tinjaun Terhadap Independesni Komisi Polisi Nasional Dalam Perspektif Lembaga Negara Independen”, *UNES LAW REVIEW* , Vol. 5, No. 4, (2023),

Ryanto Ulil Anshar, Joko Setiyono, “Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum, Vol 2, No 3, (2020)

Ramli. “Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pers Dalam melindungi Kemerdekaan Pers”, (Skripsi S1 Universitas Hasanauddin, 2021).

Rahman Amin, Muhammad Fikri Al Aziz, “ Penguatan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Oleh Polri”, KRTHA BHAYANGKARA, Vol., 17. No 1., (2023).

Yusuf, “Peran Komisi Kepolisian Nasional Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia”, Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 12 No 1, (Mei 3, 2023)

### **Peraturan Perundang – Undangan**

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 8. Lihat juga Dominic Mario Monintja, Tinjauan Yuridis Fungsi Dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Penegakkan Hukum, *Lex et Societatis*, Vo 1. II/No. 3/April/2014.

Penjelasan Umum Undang-Undang No. 16 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang - Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,  
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang – Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang komisi kepolisian national